

Model Manajemen Komunikasi Konflik dalam Negosiasi antara UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Pedagang Kaki Lima Studi Kasus pada Relokasi Teras Malioboro II

Nama Mahasiswa: Intaningrum

NIM: 253232006

Pembimbing 1: Prayudi, MA. Ph.D

Pembimbing 2: Assoc Prof Dr Edwi Arief Sosiawan, S.IP, M.Si, CIIQA, CIAR, CDMS, CPM(Asia)

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis model manajemen komunikasi konflik dalam negosiasi antara UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya (UPT PKCB) dan Pedagang Kaki Lima Teras Malioboro II pada kebijakan relokasi 2025. Relokasi kedua dari shelter eks Dinas Pariwisata DIY ke Beskalan dan Ketandan memunculkan konflik akibat relasi kuasa yang timpang, ketidaksetaraan akses informasi, dan minimnya partisipasi PKL dalam perencanaan. Pendekatan kualitatif studi kasus digunakan melalui wawancara mendalam, dengan triangulasi sumber melibatkan LBH Yogyakarta.

Analisis teori konflik Dahrendorf digunakan untuk membaca ketimpangan otoritas, resistensi kelompok, dan komunikasi yang tidak setara; sementara *Dual Concern Theory* menjelaskan perilaku strategi konflik para aktor. Temuan menunjukkan bahwa UPT PKCB menerapkan komunikasi dua arah asimetris dengan persuasi terbatas. PKL tidak memiliki ruang memengaruhi keputusan, sehingga resistensi muncul terkait mekanisme pengundian, kekhawatiran penurunan pendapatan, dan tidak dilibatkannya PKL dalam perencanaan teknis.

Penelitian ini menghasilkan model komunikasi simetris berbasis *Deliberative Collaborative Governance*, yang merekomendasikan penguatan peran UPT sebagai fasilitator deliberatif dan peningkatan inklusi PKL sejak tahap perencanaan untuk mengurangi resistensi dan memperkuat legitimasi kebijakan.

Kata kunci: manajemen komunikasi konflik, negosiasi, relokasi PKL, relasi kuasa, *Dual Concern Theory*, *deliberative collaborative governance*, UPT PKCB, Malioboro.

ABSTRACT

This research analyzes the conflict communication management model in the negotiation between UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya (UPT PKCB) and Teras Malioboro II street vendors in the 2025 relocation policy. The second relocation from the former DIY Tourism Office shelter to Beskalan and Ketandan led to conflicts due to unequal power relations, unequal access to information, and lack of street vendors' participation in planning. A qualitative case study approach was used through in-depth interviews, with source triangulation involving LBH Yogyakarta.

Dahrendorf's conflict theory analysis was used to read inequality of authority, group resistance, and unequal communication; while Dual Concern Theory explained the conflict strategy behavior of the actors. The findings show that UPT PKCB applies asymmetrical two-way communication with limited persuasion. PKL have no room to influence decisions, so resistance-especially from contra PKL-emerges regarding the draw mechanism, concerns about decreased income, and the exclusion of PKL in technical planning.

This research produced a symmetrical communication model based on Deliberative Collaborative Governance, which recommends strengthening UPT's role as a deliberative facilitator and increasing the inclusion of street vendors from the planning stage to reduce resistance and strengthen policy legitimacy.

Keywords: conflict communication management, negotiation, street vendor relocation, power relations, Dual Concern Theory, deliberative collaborative governance, UPT PKCB, Malioboro.